

**GERAKAN SOSIAL BARU: STUDI ATAS KONTRIBUSI NGO
LINGKUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG PADA ISU RUANG TERBUKA
HIJAU**

(Skripsi)

Oleh

**SALSA CANDRA
2216021112**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

GERAKAN SOSIAL BARU: STUDI ATAS KONTRIBUSI NGO LINGKUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG PADA ISU RUANG TERBUKA HIJAU

Oleh

SALSA CANDRA

Permasalahan berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan penyediaan RTH minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kondisi tersebut memunculkan respons dari aktor non-negara, khususnya Non-Governmental Organization (NGO) lingkungan, yang berupaya mengisi ruang advokasi dan partisipasi publik dalam isu lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi NGO lingkungan Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari gerakan sosial baru dalam memperjuangkan isu ruang terbuka hijau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap dua NGO lingkungan, yaitu Walhi dan Lembaga Konservasi 21. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perspektif gerakan sosial baru, khususnya melalui pendekatan teori keluhan dan teori struktur kesempatan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walhi dan Lembaga Konservasi 21 merepresentasikan karakter gerakan sosial baru melalui pola gerakan yang tematik, non-hierarkis, dan berbasis pada kesadaran ekologis. Kontribusi NGO lingkungan dalam isu RTH diwujudkan melalui pembentukan opini publik, mobilisasi gerakan, serta pengembangan isu ruang terbuka hijau melalui pemanfaatan media digital. NGO secara aktif membangun wacana kritis terhadap kebijakan pemerintah, mengorganisir aksi kolektif, serta menyebarluaskan isu RTH melalui kampanye digital, media sosial, dan jaringan komunitas. Gerakan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada perubahan kebijakan, tetapi juga pada transformasi nilai dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan perkotaan. Dengan demikian, NGO lingkungan di Kota Bandar Lampung dapat dipahami sebagai aktor gerakan sosial baru yang berperan strategis dalam mendorong tata kelola ruang terbuka hijau yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Gerakan Sosial Baru, NGO lingkungan, Ruang Terbuka Hijau, Bandar Lampung.

ABSTRACT

NEW SOCIAL MOVEMENT: A STUDY OF THE CONTRIBUTION OF ENVIRONMENTAL NGOS IN BANDAR LAMPUNG CITY TO THE ISSUE OF GREEN OPEN SPACE

By

SALSA CANDRA

The declining availability of green open space in Bandar Lampung City reflects the weak commitment of local government to fulfilling the minimum requirement of 30 percent green open space as mandated by Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning. This condition has encouraged the emergence of non-state actors, particularly environmental non-governmental organizations (NGOs), to take an active role in advocating for environmental sustainability in urban areas. This study aims to analyze the contribution of environmental NGOs in Bandar Lampung City as part of new social movements in advocating green open space issues.

This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation involving two environmental NGOs, namely Walhi and Lembaga Konservasi 21. Data analysis is conducted using the New Social Movement perspective, particularly through grievance theory and political opportunity structure theory.

The findings indicate that Walhi and Lembaga Konservasi 21 represent the characteristics of new social movements through thematic, non-hierarchical, and ecology-oriented patterns of activism. The contribution of these NGOs is manifested through public opinion formation, movement mobilization, and the development of green open space issues through digital media. Environmental NGOs actively construct critical discourses on government policies, organize collective actions, and disseminate green open space issues through digital campaigns, social media, and community networks. These movements are not solely oriented toward policy change, but also toward transforming social values and enhancing public awareness of the importance of sustainable urban environments. Therefore, environmental NGOs in Bandar Lampung City can be understood as key actors of new social movements that play a strategic role in promoting participatory and sustainable green open space governance.

Keywords: *New Social Movement, Environmental NGOs, Green Open Space, Bandar Lampung.*

**GERAKAN SOSIAL BARU: STUDI ATAS KONTRIBUSI NGO
LINGKUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG PADA ISU RUANG TERBUKA
HIJAU**

Oleh

SALSA CANDRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

**GERAKAN SOSIAL BARU: STUDI ATAS
KONTRIBUSI NGO LINGKUNGAN KOTA
BANDAR LAMPUNG PADA ISU RUANG
TERBUKA HIJAU**

Nama Mahasiswa

Salsa Candra

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216021112

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

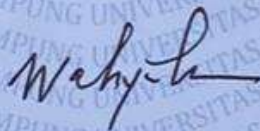
: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

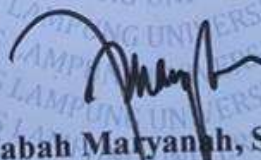
1. Komisi Pembimbing



Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.

NIP.197803282008122002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



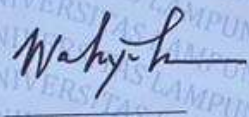
Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.

NIP. 197106042003122001

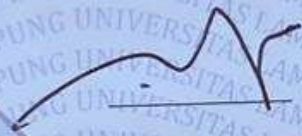
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821200032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Januari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Salsa Candra
NPM. 2216021112

Catatan :
Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Salsa Candra, lahir di Tanjung Karang 16 Juli 2003. Putri pertama dari Bapak Nyosi Candra dan Ibu Novita Sari. Penulis memiliki 1 Kakak Laki-laki, 2 Adik Laki-laki dan 1 Adik Perempuan. Penulis memulai pendidikan formalnya pada tahun 2009 di TK Islam Ibnurusyd Kotabumi, Lampung Utara. Penulis melanjutkan pendidikan formal ke jenjang Sekolah Dasar di SD Islam Ibnurusyd Kotabumi, Lampung Utara hingga tahun 2015. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 9 Bandar Lampung hingga tahun 2018 dan Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 16 Bandar Lampung sampai tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjalani studi penulis mengikuti beberapa unit kegiatan kampus (UKM). Penulis bergabung dengan UKM-F Republica sebagai reporter dan penulis juga bergabung kedalam UKM Paduan Suara FISIP Unila. Selain UKM-F, Penulis juga tergabung dalam UKM-U SRE Unila sebagai anggota *Public Relation*.

MOTTO

“Cros En Toi”
(AA)

“It Will Pass, Everything You’ve Gone Through It Will Pass”
(Rachel Vennya)

“It’s Oke, Everything Will Be Alright”
(Salsa)

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya”
(QS. Al- Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar dan Langkah hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Dan

Ku persembahkan skripsi dan gelar ini kepada

Mamaku Tersayang

Novita Sari

Serta Atuk dan Nenekku

Renvil (Alm) dan Titin

Yang tak henti memberikan dukungan dan doa serta pengorbanan dalam setiap langkahku, beribu terima kasih diucapkan hingga penulis berada di titik ini.

Terima kasih untuk keluarga besar Jurusan Ilmu Pemerintahan dan semua yang mendoakan serta mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamudlillah puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Gerakan Sosial Baru: Studi atas Kontribusi NGO Lingkungan Kota Bandar Lampung pada Isu Ruang Terbuka Hijau”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas segala saran, masukan, kritik juga ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa membantu penulis dalam proses penulisan skripsi penulis sehingga saat ini skripsi penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak ibu semoga Allah SWT senantiasa memberikan ibu kesehatan, kelancaran serta perlindungan untuk ibu beserta keluarga.
8. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan kritik serta masukan yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P. selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap Langkah dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Penulis sangat bersyukur mendapatkan ilmu dari bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dalam hidup penulis.
11. Instansi Magang penulis, DPRD Kota Bandar Lampung. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh staff persidangan DPRD Kota Bandar Lampung yang sudah menerima penulis, memberikan cukup pelajaran dan juga pengalaman, serta cerita canda dan tawa saat tergabung dalam waktu yang singkat kedalam instansi.
12. Teruntuk kedua orang tuaku mama dan papa, Terima kasih, dari lubuk hati yang dalam ayuk ucapkan atas setiap doa yang kalian panjatkan, setiap peluh dan air mata yang kalian sembunyikan demi melihat ayuk tumbuh dan

melangkah sejauh ini. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan dunia akhirat untuk mama dan papa.

13. Teruntuk abang dan adik-adikku, Wahyu, Fatir, Farel dan Queen terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat dan pengingat untuk tetap bertahan dan melangkah.
14. Terima kasih kepada sahabat- sahabat terdekat penulis Dioba, Jessica, Alya, Dela, Pingkan, dan Okta yang selalu memberi dukungan dan meyakinkan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih karena selalu berbagi canda dan tawa selama penulis menyusun tugas akhir.
15. Terima kasih kepada Putri Karisma teman seperjuangan dan sahabat penulis selama dibangku kuliah yang selalu menemani dan membantu penulis selama proses tugas akhir ini ditulis sampai penulis bisa menyelesaikannya.
16. Terima kasih kepada Alan, Kahfi, Aisy, Rita, Pitri, dan Dewi teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan ini yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kesuksesan selalu ada di setiap langkah kalian.
17. Terima kasih untuk Pm, Aul, Lila, Putdel, Yeni, Ica, Ferni, dan Lenny, yang hadir menjadi teman baik dan memberi dukungan penulis sejauh ini.
18. Teruntuk kak Adjel terima kasih sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan meyakinkan atas setiap keraguan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
19. Terakhir, untuk diriku sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta selalu menikmati prosesnya yang dibilang tidak mudah. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kamu ambil, walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan keinginan dan mungkin tidak dirayakan orang lain, tetaplah menjadi diri sendiri dan belajar mensyukuri apapun yang telah di dapatkan. Jangan lelah untuk berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada dan rayakan apapun dalam dirimu. *Proud of you!*

Bandar Lampung, 26 Januari 2026
Penulis,

Salsa Candra

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Gerakan Sosial.....	12
2.1.2 Karakteristik Gerakan Sosial Baru	16
2.1.3 Pendekatan Teoritis	17
2.2 Konseptualisasi LSM/NGO	21
2.2.1 Pengertian LSM/NGO	21
2.2.2 Peran LSM/NGO	22
2.2.3 Tipologi LSM/NGO	23
2.3 Konseptualisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	26
2.3.1 Definisi Ruang Terbuka Hijau	26
2.3.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau	27
2.3.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau	28
2.3.4 Tipologi Ruang Terbuka Hijau	28
2.3.5 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	29
2.4 Kerangka Pikir	30

III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Fokus Penelitian.....	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Informan Penelitian.....	34
3.5 Jenis dan Sumber Data	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum NGO Lingkungan Kota Bandar Lampung.....	38
4.1.1 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung.....	38
4.1.2 Lembaga Konservasi 21.....	40
4.1.3 Karakteristik NGO di Indonesia dari Periode Orde Baru hingga Reformasi.....	42
4.2 Gerakan Sosial Baru Studi atas Kontribusi NGO Lingkungan Kota Bandar Lampung pada Isu Ruang Terbuka Hijau	44
4.2.1 Perspektif Keluhan	47
4.2.2 Perspektif Struktur Kesempatan Politik.....	52
4.3 Kontribusi NGO Lingkungan Kota Bandar Lampung pada Isu Ruang Terbuka Hijau	57
V. PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penggunaan lahan eksiting Kota Bandar Lampung	3
2. Informan Penelitian	34
3. Kegiatan NGO Lingkungan Sebagai Gerakan Sosial Baru	46
4. Keluhan- Keluhan terhadap NGO Lingkungan.....	48
5. Aspirasi NGO Lingkungan	55
6. Pernyataan NGO lingkungan di Media Massa.....	57
7. Gugatan NGO Lingkungan	60
8. <i>Statement</i> (Pernyataan) NGO lingkungan.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.	31
2. Aksi- aksi NGO Lingkungan	55
3. Aksi protes Terkait Banjir	63
4. Kegiatan <i>Green Student Movement</i>	67
5. Pelatihan Paralegal	68

DAFTAR SINGKATAN

ATR	: Agraria dan Tata Ruang
BLI	: Benua Lestari Indonesia
EEN	: Eco Enzym Nusantara
GSB	: Gerakan Sosial Baru
KNCV	: Koninklijke Nedelandse Centrale Vereniging
LGBTQ	: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer
LP3ES	: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: Non-Governmental Organization
ORNOP	: Organisasi Non Pemerintah
OXFAM	: Oxford Committee for Famine Relief
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMEN	: Peraturan Menteri
P2KH	: Program Pengembangan Kota Hijau
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDM	: Sumber Daya Manusia
TPS3R	: Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle
UU	: Undang-Undang
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WWF	: World Wide Fund for Nature
XR	: Extinction Rebellion
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah kota di berbagai negara lebih banyak memusatkan perhatian pada penanganan isu-isu global seperti perubahan iklim, pemanasan global, urbanisasi, serta ancaman terhadap lingkungan melalui berbagai pendekatan dalam perencanaan kota. Kota-kota besar dan padat penduduk cenderung memiliki kompleksitas tinggi dalam struktur kehidupan warganya. Alih fungsi lahan yang masif serta meningkatnya aktivitas manusia di sektor permukiman, industri, dan transportasi turut memperparah kondisi lingkungan. Akibatnya, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan pencemaran lingkungan menjadi dampak yang sulit dihindari. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan kehadiran Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai solusi bioengineering yang berfungsi sebagai biofilter alami. RTH dinilai lebih ekonomis, aman, serta mampu menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan tetap memperhatikan aspek keindahan. Namun, pada praktiknya, kebijakan pembangunan kota masih cenderung mengabaikan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya dalam hal penyediaan ruang hijau yang memadai. RTH menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem terutama di perkotaan yang relatif padat akan penduduk dan aktivitas. Faktanya RTH merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan iklim perkotaan namun belum maksimal dijalankan dan diperhatikan di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa RTH dari suatu kota memiliki standar minimal yaitu 30% dari luas wilayah yang ada.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota di Pulau Sumatera yang mengalami urbanisasi pesat serta peningkatan penduduk, sekitar 1,1 juta jiwa per 2023, pembangunan infrastruktur, serta ekspansi kawasan pemukiman dan komersial. urbanisasi ini menyebabkan alih fungsi lahan secara masif. Salah satu isu krusial yang muncul adalah semakin menyempitnya atau berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) Sebagai elemen penting dalam berkelanjutan ekosistem. Ruang terbuka hijau berupa kawasan tanpa bangunan di antara kawasan terbangun. Penyediaan ruang terbuka hijau memiliki fungsi keindahan, kesehatan, keamanan, serta sebagai salah satu upaya tanggap bencana. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan juga menyebutkan, RTH di sebuah kota penting untuk menjamin tersedianya ruang konversi, kawasan pengendalian air tanah, area pengembangan keanekaragaman hayati serta area penciptaan iklim mikro. Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjadi salah satu indikator kota yang layak huni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota wajib menyediakan minimal 30% dari total luas wilayahnya untuk ruang terbuka hijau. Bandar Lampung adalah salah satu kota yang dituntut menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 Tetang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Jenis ruang terbuka hijau kawasan Perkotaan meliputi: Taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkotaan dan Gedung komersil, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun Binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pendestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyanggah, lapangan udara dan taman atap (*roof garden*). Keberadaan ruang terbuka hijau yang masih minim merupakan salah satu isu

yang penting di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 19.722 hektre dengan kontur perbukitan dan pesisir, maka seharusnya Kota Bandar Lampung memiliki suatu ruang terbuka hijau dengan total luas Minimal 5.916 ha yang terdiri dari RTH publik atau lahan milik pemerintah sekurang-kurangnya 3.944 ha (20% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung). Akan tetapi sampai saat ini Kota Bandar Lampung masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi 30% kebutuhan ruang terbuka hijau dapat dilihat dari data Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, RTH Kota Bandar Lampung diketahui bahwa total luas RTH Publik eksisting Kota Bandar Lampung sebesar 2.184,79 Ha atau 11,08% dari luas total Kota Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Penggunaan lahan eksisting Kota Bandar Lampung

No.	Jenis RTH Publik	Luas (Ha)
1.	Sempadan Sungai dan Pantai	0,9
2.	Lapangan Upacara	1,60
3.	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
4.	Jalur Sutet	5,60
5.	Jalur Hijau	6,50
6.	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
7.	Lapangan Parkir	12,70
8.	Taman Kota	19,25
9.	Taman Wisata Alam	22,30
10.	Lapangan Olahraga	25,70
11.	Taman Rekreasi	29,20
12.	Pemukaman	40,33
13.	Media Jalan dan Pedestrian	43,01
14.	Hutan Kota	83,00
15.	Lahan Pertanian	278,40
16.	Hutan Lindung	350,00
17.	Taman Hutan Raya	510,00

No.	Jenis RTH Publik	Luas (Ha)
18.	Bentang Alam	745,00
	Jumlah total luas RTH publik	2.184,79
	Luas Kota Bandar Lampung	19.722,00
	% Luas RTH Publik	11,08

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung 2013

Salah satunya hutan kota yang merupakan salah satu bagian dari ruang terbuka hijau yang dimiliki Kota Bandar Lampung yang kini sudah tidak ada lagi keberadaannya karena ahli fungsi. Salah satu NGO Lingkungan Kota Bandar Lampung Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung mengatakan hilangnya taman hutan kota Way Halim Bandar Lampung tentu berdampak buruk terhadap keberlangsungan lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat setempat. Menurut Walhi Lampung ruang terbuka hijau (RTH) di Bandar Lampung menyusut drastis dari kurang lebih 11% menjadi hanya 4-4,6%, jauh di bawah ambang baku minimal 30% sebagaimana diatur dalam undang-undang No 26/2007. Terdapat beberapa jenis ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung salah satunya ruang terbuka hijau publik, termasuk taman kota di kecamatan Enggal yang memiliki luas sekitar 1,5 hektar, taman pemakaman umum, jalur hijau, lapangan olahraga, hutan kota, taman hutan raya, dan bentang alam.

Penurunan ini utamanya disebabkan oleh perubahan fungsi ruang terbuka hijau lewat Perda Rencana Tata Ruang Wilayah No 4 Tahun 2021 yang mengizinkan alih fungsi ke area bangunan dan komersial. Alih fungsi lahan terhadap RTH di Kota Bandar Lampung mencapai 368,58 Ha hilang antara tahun 2009-2015. Penyusutan RTH ini menyebabkan penurunan kualitas udara, peningkatan resiko banjir, iklim mikro memburuk, dan berpotensi menurunkan kesehatan Masyarakat. Selain aspek ekologi, rendahnya RTH juga menurunkan kualitas ruang sosial masyarakat kehilangan akses ruang terbuka untuk keperluan rekreasi, olahraga dan interaksi sosial. Sehingga memaksa masyarakat khususnya anak muda untuk mencari tempat alternatif tidak layak, misalnya "Underpass Unila". Pemerintah kota belum memaksimalkan dalam menegakkan UU RTH 30%, meski telah ada program seperti P2KH.

Di tengah lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan dan penambahan RTH, munculnya aktor-aktor non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non-Governmental Organization* (NGO) menjadi penyeimbang dalam dinamika kebijakan dan advokasi lingkungan. NGO lingkungan di Kota Bandar Lampung telah menunjukkan peran aktif dalam mengedukasi publik, mendorong partisipasi warga, hingga menekan kebijakan pemerintah terkait pelestarian ruang terbuka hijau. Fenomena ini mencerminkan munculnya sebuah pola gerakan sosial baru, yang tidak lagi bersifat revolusioner seperti dalam gerakan tradisional, tetapi lebih bersifat tematik, spesifik, dan memanfaatkan jaringan serta pendekatan non-konfrontatif.

Non Governmental Organization (NGO) lingkungan Kota Bandar Lampung telah mengorganisir inisiatif publik untuk menyoroti dan mendorong perubahan kebijakan Ibu Kota. NGO lingkungan Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial baru, yang menekankan isu kelestarian lingkungan, partisipasi publik, dan advokasi non-partisipan. Peran serta gerakan sosial baru ini relevan untuk kembali mendorong penyediaan RTH sesuai standar, serta meningkatkan kesadaran dan tekanan terhadap kebijakan Ibu Kota. Penelitian ini penting untuk mengungkapkan bagaimana *Non Governmental Organization* (NGO) melalui gerakan sosial baru mampu mempengaruhi kebijakan ruang hijau, meningkatkan kepedulian publik, dan berkontribusi pada tata kelola yang lebih berkelanjutan.

Penulis tertarik dan memutuskan Walhi dan Lembaga Konservasi 21 sebagai objek penelitian. Karena Walhi dan Lembaga Konservasi 21 dinilai sebagai organisasi lingkungan terdepan dalam aksi penyelamatan lingkungan. Walhi dan Lembaga Konservasi 21 dikenal aktif sebagai NGO lingkungan yang menyuarakan kepentingan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Keterkaitan antara ruang terbuka hijau (RTH) dan organisasi lingkungan seperti Walhi dan Lembaga Konservasi 21 terletak pada peran RTH sebagai salah satu instrumen vital dalam mengatasi degradasi lingkungan yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Walhi dan Lembaga Konservasi sebagai NGO lingkungan yang memiliki fokus pada isu-isu lingkungan, berkontribusi dalam upaya pelestarian

dan pengembangan RTH. Oleh karena itu, menarik untuk ditelaah bagaimana peran dan kontribusi NGO lingkungan seperti Walhi dan Lembaga Konservasi 21 dalam mendukung pengelolaan serta penyelamatan RTH di Kota Bandar Lampung.

Gerakan sosial baru ditandai dengan lahirnya inisiatif warga yang difasilitasi oleh Non Governmental Organization dengan pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks isu RTH di Bandar Lampung, kontribusi NGO menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut, tidak hanya dari sisi aksi lapangan tetapi juga dari segi strategi advokasi dan relasi kekuasaan yang dibangun. Hal ini membuka ruang kajian yang relevan untuk melihat bagaimana NGO sebagai aktor gerakan sosial baru turut membentuk wacana dan aksi kolektif dalam isu-isu lingkungan lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi NGO lingkungan di Kota Bandar Lampung dalam memperjuangkan isu ruang terbuka hijau, serta menelaahnya dalam perspektif gerakan sosial baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran civil society dalam pengelolaan lingkungan perkotaan serta relevansinya dalam praktik demokrasi partisipatoris di level lokal.

Penelitian sebelumnya dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan atau teori- teori melalui hasil berbagai merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung menurut peneliti yang perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan NGO lingkungan pada isu ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal melalui internet.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pramaishwara, dkk. (2022) dengan judul Gerakan Sosial Baru: Studi Tentang Kontribusi Benua Lestari Indonesia dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Tangerang. Penelitian terkait Benua Lestari Indonesia (BLI) menunjukkan bahwa NGO ini berperan penting dalam gerakan sosial lingkungan di Kota Tangerang. Peran utamanya terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai kekuatan penyeimbang melalui advokasi dan lobi kebijakan, sebagai

penggerak pemberdayaan masyarakat lewat program magang, kampanye lingkungan, dan edukasi, serta sebagai perantara yang menjalin kerja sama dengan pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Meski berkontribusi signifikan, BLI menghadapi hambatan internal seperti keterbatasan SDM, kurangnya keterampilan, dan tidak adanya pendapatan tetap. Hambatan eksternal meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dan penolakan terhadap program. Untuk mengatasi hal ini, BLI melakukan strategi mobilisasi sumber daya manusia, material (seperti fasilitas TPS3R), dan moral (dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan NGO lain) guna menjaga eksistensi dan efektivitas gerakan lingkungan yang dijalanakannya. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis tetapi memiliki kesamaan teoritis yaitu Gerakan sosial baru.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, S. N., & Prihatin, S. D. (2023) dengan judul Gerakan Sosial Baru: Pengolahan Sisa Bahan Organik oleh Komunitas Eco-enzyme Nusantara di Kabupaten Sleman. penelitian tersebut menunjukkan bahwa EEN Sleman merupakan bentuk nyata dari GSB karena berhasil memperjuangkan isu lingkungan melalui pengolahan limbah organik menjadi eco-enzyme secara partisipatif dan non-komersial. Komunitas ini tidak hanya mempromosikan penggunaan eco-enzyme, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah organik, dengan tujuan menciptakan perubahan perilaku menuju pelestarian lingkungan. Gerakan ini bersifat edukatif, inklusif, dan memperluas basis massa melalui pelibatan relawan tanpa orientasi keuntungan. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengangkat kontribusi NGO lingkungan di Kota Bandar Lampung dalam memperjuangkan isu Ruang Terbuka Hijau (RTH), terlihat kesamaan dalam karakteristik gerakannya, yakni mengedepankan transformasi nilai, partisipasi masyarakat, serta peran aktor non-negara dalam mengisi celah regulatif dan meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat urban. Perbedaan terletak pada isu spesifik yang diperjuangkan—EEN fokus pada pengelolaan sampah, sementara NGO di Bandar Lampung fokus pada pelestarian RTH—namun keduanya sama-sama mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam gerakan sosial baru.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nofrima, S. & Qodir, Z. (2021) dengan judul Gerakan Sosial Baru Indonesia: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019. Pada penelitian ini Gerakan sosial baru menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi dan media sosial telah menjadi elemen utama dalam mengorganisir aksi massa dan menyampaikan pesan kolektif kepada publik. Tidak seperti gerakan sosial lama yang berbasis ideologi politik tunggal dan struktur hierarkis, Gejayan Memanggil memanfaatkan pluralisme ide dan jaringan horizontal antarkomunitas untuk menciptakan partisipasi luas. Framing isu dilakukan secara strategis melalui media sosial untuk membangun kesadaran publik, mengkonsolidasikan massa, dan memperluas jangkauan pesan gerakan. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan sosial baru lebih mengutamakan nilai-nilai, simbolik, dan identitas kolektif ketimbang agenda politik ideologis. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang mengkaji kontribusi NGO lingkungan di Kota Bandar Lampung terhadap isu Ruang Terbuka Hijau (RTH), keduanya sama-sama mencerminkan karakteristik GSB, khususnya dalam hal pendekatan non-struktural, partisipatif, dan penggunaan media dalam advokasi isu publik. Perbedaannya terletak pada skala dan isu yang diperjuangkan: Gejayan Memanggil bersifat politis dan reaktif terhadap kebijakan negara, sedangkan NGO lingkungan di Bandar Lampung bergerak secara tematik dan berkelanjutan dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat melalui isu RTH. Meski berbeda konteks, keduanya memperlihatkan pergeseran cara masyarakat sipil beraktivisme di era digital dan pasca-materialistik.

Keempat, penelitian berupa jurnal dengan judul Manifestasi Gerakan Sosial Baru dalam Krisis Iklim (Studi Kasus: *Extinction Rebellion* Indonesia) oleh Dina, N. (2021) Penelitian mengenai gerakan *Extinction Rebellion* (XR) Indonesia memberikan gambaran penting tentang dinamika gerakan sosial baru dalam konteks krisis iklim di Indonesia. XR Indonesia menunjukkan karakteristik utama dari gerakan sosial baru, yakni desentralisasi struktur, fleksibilitas keanggotaan, dan pendekatan nir-kekerasan dalam advokasi lingkungan. Strategi yang digunakan juga bersifat adaptif terhadap konteks lokal: XR Indonesia memilih strategi keterlibatan kritis (*critical engagement*) yang memungkinkan mereka tetap menjaga independensi gerakan sambil membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah. Hal ini berbeda dengan XR Pusat

di negara lain, yang cenderung lebih konfrontatif melalui aksi penangkapan massal karena tingkat kesadaran publik yang sudah tinggi. Strategi XR Indonesia menekankan pembangunan kesadaran publik terlebih dahulu, melalui kolaborasi lintas gerakan dan pembentukan local chapter di berbagai daerah. dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat kesamaan dalam hal pendekatan non-konfrontatif, penguatan basis lokal, dan orientasi pada perubahan kesadaran masyarakat. Perbedaan terletak pada jenis organisasi (gerakan komunitas vs NGO formal) serta isu yang diperjuangkan (krisis iklim secara umum vs isu spesifik RTH). Meski demikian, keduanya mencerminkan evolusi bentuk aktivisme di Indonesia yang tidak lagi bergantung pada ideologi tunggal atau struktur hirarkis, melainkan mengedepankan nilai-nilai ekologis, keterlibatan publik, dan fleksibilitas dalam strategi pergerakan.

Kelima, Penelitian yang terakhir berupa jurnal dengan judul Gerakan Sosial Baru dan Ekologi Politik: Peran Walhi Dalam Mengawasi Pengadaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Tahun 2017-2021 oleh Virian, D. (2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan hidup, khususnya terkait RTH, masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada ekspansi fisik kota. Narasi pemerintah yang menyatakan ketidaksanggupan memenuhi target 30% RTH lebih banyak didasarkan pada dominasi alokasi lahan untuk perumahan, perkantoran, dan pusat bisnis. Kebijakan seperti Permen ATR No. 14 Tahun 2022 justru memperlihatkan bagaimana regulasi dapat digunakan sebagai alat legitimasi untuk mempolitisasi isu lingkungan. Dalam konteks ini, WALHI berperan sebagai bagian dari gerakan sosial baru yang mencoba menyuarakan keadilan ekologis melalui jalur advokasi, kampanye publik, dan legal standing. Namun, penelitian ini juga menunjukkan keterbatasan WALHI dalam hal kecepatan pengumpulan data dan efektivitas pengawasan kebijakan dalam jangka pendek. Bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang mengkaji kontribusi NGO lingkungan di Kota Bandar Lampung terhadap isu RTH, terdapat kesamaan dalam karakteristik gerakannya sebagai bagian dari gerakan sosial baru: keduanya berperan sebagai aktor non-negara yang hadir untuk memperjuangkan isu ekologis dan menyeimbangkan relasi kuasa antara masyarakat dan negara. Namun, konteks

lokal dan skala pengaruhnya berbeda. WALHI sebagai NGO nasional berhadapan dengan sistem politik dan pembangunan yang kompleks di ibu kota negara, sementara NGO di Bandar Lampung beroperasi dalam skala lokal dengan tantangan tersendiri dalam advokasi dan kolaborasi dengan masyarakat serta pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kontribusi NGO lingkungan Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari gerakan sosial baru dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi NGO lingkungan Kota Bandar Lampung sebagai gerakan sosial baru dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis: Sebagai bahan evaluasi bagi stakeholder terutama Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pelaku NGO Lingkungan, dan Masyarakat untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kerja NGO lingkungan, sehingga memudahkan penyusunan strategi advokasi yang lebih efektif, seperti peningkatan kapasitas, pendanaan, atau mekanisme koordinasi.
2. Manfaat teoritis: Menjabarkan kerangka konseptual mengenai misi dan strategi NGO lingkungan dalam memperjuangkan ruang terbuka hijau (RTH), sehingga memperkaya literatur perencanaan kota dan studi NGO lingkungan.

3. Manfaat sosial: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau untuk kesehatan lingkungan dan kualitas hidup di Kota Bandar Lampung dan juga memfasilitasi jaringan komunitas sehingga mendorong terbangunnya jejaring kerjasama lintas sektor yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Gerakan Sosial

Pembangunan perkotaan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang kuat pada orientasi pertumbuhan ekonomi dan ekspansi fisik wilayah. Dalam kerangka tersebut, lingkungan hidup, termasuk ruang terbuka hijau (RTH), kerap diposisikan sebagai objek pembangunan yang dapat dialihfungsikan demi kepentingan ekonomi dan infrastruktur. Cara pandang ini merefleksikan paradigma antroposentris, di mana manusia ditempatkan sebagai pusat kepentingan, sementara lingkungan diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi. Dampak dari paradigma tersebut terlihat nyata dalam berbagai persoalan lingkungan perkotaan, seperti banjir, penurunan kualitas lingkungan, serta hilangnya fungsi ekologis ruang hijau.

Seiring meningkatnya krisis ekologis, pendekatan pembangunan yang berorientasi semata pada ekonomi mulai mendapat kritik dari berbagai kalangan. Dalam konteks ini, muncul cara pandang alternatif yang menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari sistem kehidupan, yaitu paradigma ekosentrisme. Paradigma ini memandang lingkungan tidak hanya bernilai secara instrumental bagi manusia, tetapi memiliki nilai intrinsik yang harus dijaga keberlanjutannya. Pergeseran cara pandang ini menjadi landasan penting bagi munculnya gerakan-gerakan sosial lingkungan yang menuntut perubahan orientasi kebijakan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

Kajian mengenai gerakan sosial mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam literatur sosiologi dan ilmu politik, gerakan sosial umumnya dibedakan ke dalam dua paradigma besar, yaitu Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*) dan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*). Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada bentuk gerakan, tetapi juga pada cara pandang terhadap isu, aktor, tujuan, serta strategi yang digunakan dalam memperjuangkan perubahan sosial.

A. Gerakan Sosial Lama

Gerakan Sosial Lama berkembang terutama pada periode masyarakat industri, khususnya sebelum tahun 1960-an. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran struktural dan materialis, terutama teori konflik dan Marxisme, yang memandang gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi dan dominasi kelas. Fokus utama Gerakan Sosial Lama adalah pada isu-isu ekonomi dan material, seperti upah, kondisi kerja, distribusi sumber daya, serta hubungan produksi antara kelas pekerja dan pemilik modal.

Dalam paradigma Gerakan Sosial Lama, aktor utama gerakan umumnya bersifat kolektif dan terorganisir secara hierarkis, seperti serikat buruh, partai politik, dan organisasi massa. Negara diposisikan sebagai arena utama perebutan kekuasaan, sehingga tujuan gerakan cenderung diarahkan pada perubahan kebijakan atau struktur negara melalui tekanan politik yang bersifat konfrontatif. Dengan demikian, keberhasilan gerakan sosial lama sering diukur dari sejauh mana tuntutan ekonomi atau politik dapat diakomodasi oleh negara.

B. Gerakan Sosial Baru

Memasuki paruh kedua abad ke-20, terutama pasca tahun 1960-an, muncul bentuk-bentuk gerakan sosial yang tidak lagi dapat dijelaskan sepenuhnya oleh paradigma gerakan sosial lama. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai

Gerakan Sosial Baru. Gerakan Sosial Baru muncul sebagai respons terhadap perubahan masyarakat menuju masyarakat pasca-industri, meningkatnya kesadaran individu, serta meluasnya isu-isu non-material yang berkaitan dengan kualitas hidup, identitas, dan keberlanjutan lingkungan.

Berbeda dengan Gerakan Sosial Lama yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kelas sosial, Gerakan Sosial Baru lebih menekankan pada isu-isu tematik dan kultural, seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, gender, identitas, serta demokrasi partisipatoris. Aktor dalam Gerakan Sosial Baru tidak lagi terbatas pada kelompok kelas tertentu, tetapi melibatkan beragam elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO), komunitas, kelompok profesional, dan individu-individu yang memiliki kesadaran kolektif atas suatu isu.

Gerakan Sosial Baru juga ditandai oleh pola organisasi yang lebih cair, partisipatif, dan non-hierarkis. Strategi yang digunakan tidak selalu bersifat konfrontatif, melainkan mengombinasikan advokasi kebijakan, kampanye publik, edukasi, serta pemanfaatan media massa dan media sosial. Tujuan gerakan tidak hanya diarahkan pada perubahan kebijakan formal, tetapi juga pada pembentukan nilai, wacana, dan kesadaran sosial dalam jangka panjang.

Menurut Singh (2010), Gerakan sosial baru didefinisikan oleh pluralitas, cita-cita, tujuan, kehendak, orientasi dan oleh heterogenitas basis sosial kelompok. Gerakan sosial ini melampaui dunia manusia, alam raya, menanggapi persoalan atas planet tempat manusia bertahan hidup. Dalam hal ini Gerakan sosial baru tampil sebagai trans-manusia, mendukung pelestarian alam manusia dimana manusia menjadi bagiannya. Singh menjelaskan bahwa Gerakan sosial baru merupakan cermin dari sebuah masyarakat baru dengan kesadaran diri akan masa depan, merupakan

sebuah paradigma baru akan aksi kolektif, dan sebuah refleksi akan pemberontakan kultural.

GSB juga sering muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap institusi formal seperti partai politik, parlemen, atau lembaga pemerintah yang dianggap tidak mampu menyuarakan aspirasi masyarakat secara inklusif. Oleh karena itu, GSB cenderung berkembang di luar jalur institusional, dengan struktur organisasi yang lebih cair, horizontal, dan berbasis jaringan (*network-based*). Hal ini memungkinkan mereka untuk bergerak secara fleksibel, cepat, dan adaptif dalam menanggapi isu-isu yang muncul di masyarakat.

Selain itu, GSB juga mencerminkan perubahan dalam pola partisipasi politik masyarakat kontemporer. Anggota GSB seringkali berasal dari kelompok kelas menengah terdidik, mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, kelompok minoritas, hingga komunitas digital. Mereka memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk memperluas jangkauan gerakan, membangun solidaritas lintas negara, dan mengorganisir aksi-aksi kolektif dengan cara-cara yang inovatif, seperti kampanye daring (*online activism*), petisi digital, protes simbolik, dan seni perlawanan.

C. Masa Transisi dari Gerakan Sosial Lama ke Gerakan Sosial Baru

Peralihan dari Gerakan Sosial Lama menuju Gerakan Sosial Baru tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu **masa transisi** yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Perkembangan kapitalisme lanjut, meningkatnya kompleksitas masyarakat perkotaan, serta munculnya krisis multidimensi termasuk krisis lingkungan telah menggeser fokus gerakan sosial dari persoalan distribusi ekonomi menuju persoalan kualitas hidup dan keberlanjutan.

Dalam masa transisi ini, negara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya aktor yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial. Kegagalan negara

dalam mengatasi berbagai persoalan publik, seperti degradasi lingkungan dan ketimpangan ruang kota, mendorong munculnya aktor-aktor non-negara, khususnya organisasi masyarakat sipil, untuk mengambil peran lebih aktif. Gerakan sosial mulai bergerak dari pola konfrontasi langsung menuju strategi yang lebih adaptif, seperti membangun opini publik, memperkuat jaringan, dan memanfaatkan ruang demokrasi yang tersedia.

Masa transisi ini juga ditandai oleh perubahan cara pandang terhadap alam dan pembangunan. Jika dalam paradigma lama alam diposisikan sebagai objek eksploitasi demi pertumbuhan ekonomi, maka dalam paradigma baru alam dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dijaga keberlanjutannya. Perubahan paradigma ini memperkuat kemunculan gerakan lingkungan sebagai bagian dari Gerakan Sosial Baru, yang memperjuangkan isu ekologis tidak hanya sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai persoalan sosial dan politik yang menyangkut kepentingan publik secara luas.

Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru dapat dipahami sebagai kelanjutan sekaligus pembaruan dari Gerakan Sosial Lama. Gerakan ini tidak sepenuhnya meninggalkan perjuangan struktural, tetapi memperluasnya dengan pendekatan berbasis nilai, identitas, dan partisipasi masyarakat. Pergeseran paradigma inilah yang menjadi landasan teoritis dalam memahami peran NGO lingkungan sebagai aktor gerakan sosial baru dalam memperjuangkan isu ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

2.1.2 Karakteristik Gerakan Sosial Baru

Adapun yang menjadi karakteristik gerakan sosial baru yaitu:

a. Fokus pada Isu Non-Ekonomi

GSB seringkali tidak berorientasi pada tuntutan ekonomi, tetapi pada isu-isu seperti: Lingkungan hidup (gerakan hijau), Hak-hak perempuan (feminis), Hak-hak minoritas (LGBTQ+, etnis minoritas),

Antikekerasan dan anti- militerisme, Hak digital dan kebebasan informasi (misalnya gerakan *open-source* atau *net neutrality*).

b. Bersifat Desentralisasi

Tidak seperti gerakan buruh yang terorganisir secara hierarkis, GSB seringkali bersifat horizontal dan desentralisasi. Kepemimpinan kolektif dan partisipasi terbuka menjadi ciri khas.

c. Partisipatif dan Kultural

GSB lebih menekankan perubahan kesadaran dan budaya. Taktik seperti seni jalanan, musik, pertunjukan, dan penggunaan media sosial menjadi bagian dari strategi mereka.

d. Menggunakan Media Alternatif

GSB menggunakan media sosial dan teknologi digital untuk menyebarkan ideologi dan melakukan mobilisasi, menjadikannya lebih fleksibel dan luas jangkauannya dibandingkan gerakan tradisional.

e. Bersifat Global dan Transnasional

Meskipun memiliki akar lokal, banyak GSB bersifat transnasional. Contohnya: gerakan lingkungan global seperti *Fridays for Future* atau *Extinction Rebellion*.

2.1.3 Pendekatan Teoritis

Dalam Gerakan Sosial Baru, terdapat beberapa pendekatan teoritis yang umum digunakan untuk menganalisis dinamika suatu gerakan, antara lain Teori Keluhan (*Grievance Theory*), Teori Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure*), Teori Struktur Mobilisasi, serta Teori Proses Framing. Namun, untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis dalam penelitian ini, maka pendekatan teoritis yang dipilih adalah Teori Keluhan dan Teori Struktur Kesempatan Politik, karena keduanya dianggap paling relevan dan sesuai dengan konteks gerakan sosial yang menjadi objek kajian.

a. Teori Keluhan

Sidney (2011) dan beberapa akademisi gerakan sosial memodifikasi konsep eksploitasi kelas (yang muncul pada gerakan sosial lama)

menjadi teori keluhan dan kemudian digunakan sebagai pisau analisis dalam membaca gerakan sosial dan berbagai bentuk politik perlawanan lainnya. Menurut Melucci (1989) Gerakan Sosial Baru merupakan suatu gerakan yang dibentuk atas reaksi dari keluhan baru.

Menurut Fowerker (1995), keluhan baru mendorong terbentuknya gerakan sosial baru. Dalam konteks negara-negara di Eropa Barat, keluhan itu berupa bentuk baru subordinasi kapitalisme, komersialisasi kehidupan sosial, ekspansi kapitalisme yang mengkooptasi budaya, kebahagiaan dan seksualitas, birokrasi di masyarakat, homogeni kehidupan masyarakat melalui intervensi media massa. Sedangkan di Amerika Latin keluhan baru menstimulasi gerakan sosial baru, akibat dari gagalnya pembangunan, tindakan represif militer, penolakan kebijakan populis atau dukungan terhadap kebijakan populis seperti pendidikan gratis bagi masyarakat miskin adalah bentuk-bentuk keluhan baru yang digunakan oleh para aktor-aktor baru dalam membangun gerakan sosial.

Johnson (1966) menjelaskan ketidakseimbangan sosial seringkali menjadi faktor utama munculnya keluhan yang dimensinya dapat berupa makro (sistemik) maupun mikro (individu) dan menjadi pendorong utama sebuah gerakan sosial. Johnson mengutip penelitian Wallace (1876) mengenai faktor-faktor ketidakseimbangan sosial tersebut adalah:

1. Perubahan iklim, yang mengancam hal dasar bertahan makhluk hidup.
2. Wabah penyakit, yang mengakibatkan perubahan struktur populasi.
3. Perang, yang menguras sumberdaya ekonomi masyarakat, akibat dari dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh perang.
4. Konflik internal, antar kelompok yang berkepentingan menyebabkan kerugian ekstrim dari suatu kelompok masyarakat.
5. Posisi subordinasi dan inferior dari suatu kelompok Masyarakat

Menurut Donatella et.all., (2006) teori keluhan juga sangat relevan digunakan untuk memahami dan menjelaskan kemunculan Gerakan lingkungan pada abad ke-20, karena keluhan baru akan selalu memicu terciptanya gerakan baru. Saat munculnya gerakan lingkungan hidup di hampir semua negara di dunia tak terkecuali di Indonesia, dipicu oleh degradasi lingkungan hidup seperti pencemaran sungai laut tanah dan udara atau berkurangnya tutupan hutan yang kemudian menyebabkan berbagai bencana seperti tanah longsor, banjir kekeringan dan perubahan iklim. Pencemaran lingkungan dan menurunnya tutupan hutan menjadi salah satu penyebab munculnya keluhan baru masyarakat dan mendorong berkembangnya gerakan lingkungan hidup.

b. Teori Struktur Kesempatan Politik

Pada dekade 1960-an para akademisi gerakan sosial tidak sependapat lagi perihal penggunaan teori keluhan sebagai satu-satunya teori utama dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial di Amerika Utara dan Eropa Barat. Pada konteks Indonesia sejalan dengan proses demokratisasi dan keterbukaan saat memasuki era reformasi menyediakan kemungkinan bagi gerakan lingkungan semakin berkembang dan membuka peluang untuk melakukan kritik atau protes atas kebijakan yang disinyalir merusak lingkungan.

Doug et all., (2001) mengembangkan variabel-variabel teori kesempatan politik. Pertama, ketika sistem politik mulai terbuka dan akses terhadap lembaga-lembaga politik mudah, maka gerakan sosial mudah berkembang. Kedua, saat negara mengalami ketidakseimbangan politik di sisi lain keseimbangan baru mulai terbentuk. Ketiga, ketika para elit politik sedang mengalami konflik, kemudian konflik tersebut menjadi suatu kesempatan yang digunakan oleh para aktor gerakan sosial melakukan perubahan. Keempat, saat para aktor gerakan sosial mencari dukungan dari para elit politik yang berada di dalam sistem untuk melakukan perubahan.

Kriesi (2004) mengajukan sejumlah penjelasan sekaligus memaparkan lebih dalam dan spesifik mengenai teori kesempatan politik. Terdapat dua hal yang penting bagi Kriesi; pertama, teori kesempatan politik bukanlah sebuah konsep yang kaku dan konstan; kedua, teori ini dimungkinkan mengalami perubahan sewaktu-waktu sebagai kontrol para elit di dalam sistem atau tercapainya konsolidasi elit lama. Karenanya, Kriesi menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor struktur kelembagaan formal, informal dan strategi yang digunakan oleh para pelaku perubahan atau pelaku gerakan sosial.

Brockett (2005) sejalan dengan Kriesi, namun memiliki penekanan elemen yang berbeda dengan Kriesi dan Tarrow, elemen-elemen tersebut antara lain akses kelembagaan diminta para pelaku perubahan, kehadiran sekutu, fragmentasi elit dan penggunaan cara represif, dan perluasan protes. Rucht menambahkan, beberapa pertimbangan aspek penting lainnya, antara lain, akses terhadap partai politik, kapasitas pemerintahan dalam implementasi kebijakan, dan struktur aliansi.

Menurut Sukamana (2016) semakin demokratisnya suatu negara semakin terbukanya peluang bagi NGO untuk menyuarakan aspirasinya. Hadirnya NGO yang secara bebas menjalankan peran dalam menyuarakan aspirasinya, disebabkan adanya kesempatan politik saat ini. Hal tersebut menjadi peluang bagi NGO. Dalam menjalankan perannya untuk menyuarakan aspirasi di ruang publik seperti diskusi, menghadirkan informasi dan kampanye. Secara tidak langsung demokratisasi hadir memudahkan NGO untuk mengekspresikan gerakannya secara bebas. Teori struktur kesempatan politik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kesempatan politik berpengaruh dalam perkembangan gerakan sosial atas ketidakadilan lingkungan di Indonesia dengan menggunakan dimensi-dimensi teori struktur kesempatan politik yang dipaparkan di atas. Dengan menggunakan teori ini, dapat dilihat frekuensi dan besaran aksi-aksi kolektif maupun gerakan lingkungan hidup pasca reformasi.

Dalam konteks penelitian ini, upaya memperjuangkan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan dapat dikategorikan sebagai bagian dari gerakan sosial baru (GSB). Hal ini karena perjuangan tersebut tidak hanya berfokus pada isu lingkungan semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial yang lebih luas, seperti perlindungan ekologi dan kesadaran kolektif akan pentingnya ruang hidup yang sehat dan berkelanjutan di kota.

Lebih jauh, perjuangan atas RTH juga mencerminkan tuntutan atas hak warga terhadap kota, khususnya dalam hal akses terhadap ruang publik yang layak. Dalam hal ini, gerakan yang muncul menjadi bentuk resistensi terhadap dominasi kapitalisme dalam pengelolaan ruang kota, yang sering kali mengabaikan kepentingan ekologis dan kesejahteraan masyarakat demi kepentingan ekonomi dan pembangunan yang eksploitatif.

2.2 Konseptualisasi LSM/NGO

2.2.1 Pengertian LSM/NGO

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau disebut juga dengan *Non-Government Organization* (NGO) dapat diartikan organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Terjadi pergantian penyebutan istilah LSM, sebelumnya menggunakan sebutan Organisasi Non Pemerintah atau disingkat ORNOP yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa inggris yakni *Non-Government Organization* (NGO). Kemudian pada akhir tahun 1970, istilah LSM mulai digunakan di Indonesia untuk mengganti istilah ORNOP atau NGO. Perubahan istilah menjadi LSM dikarenakan istilah yang sebelumnya

yaitu NGO/ORNOP memiliki konotasi negatif, seakan istilah ini menggambarkan organisasi dibentuk sebagai lawan dari pemerintah. Padahal organisasi tersebut secara sadar dibangun dan bergerak di atas landasan dan misi positif membangun kemandirian dan keswadayaan.

Perlu diperhatikan bahwa lembaga swadaya masyarakat juga merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi pembentukan LSM ini berdasarkan asas sukarela tanpa adanya harapan untuk memperoleh laba yang besar. Selain berasaskan sukarela, lembaga swadaya masyarakat juga berdiri di atas asas Pancasila. Hal ini tentunya karena lembaga swadaya masyarakat hidup dan berkembang di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Tentunya prinsip-prinsip dalam Pancasila ini senantiasa diterapkan dalam setiap kegiatan LSM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.2.2 Peran LSM/NGO

NGO atau LSM berperan penting dalam memperkuat suara masyarakat sipil. Menurut David Korten (1990), terdapat tiga generasi NGO:

1. *Relief and Welfare* – fokus pada bantuan kemanusiaan.
2. *Small-scale, self-reliant local development* – fokus pada pemberdayaan.
3. *Sustainable systems development* – fokus pada perubahan sistemik.

Hayzer (1995) memaparkan tiga jenis peranan yang dapat dimainkan LSM, yaitu:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat pada tingkat *grassroots* dari yang sangat mendasar, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pengaruh politik dengan cakupan yang luas melalui jaringan kerja sama pada suatu negara bahkan dengan organisasi internasional lainnya.
- c. Berpartisipasi ikut serta mengambil bagian dalam menentukan tujuan dan perencanaan pembangunan.

Culla(2006) menjelaskan konsep mengenai peran LSM dalam bukunya, dengan mengadaptasi kerangka konseptualisasi yang dipaparkan oleh Abdi Rahmat, terdapat tiga peranan yang biasanya dilakukan LSM yakni:

- a. *Countervailing Power* (Kekuatan Penyeimbang): LSM berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengendalikan, melawan dan menekan kekuasaan serta tipu daya yang dilakukan oleh elit politik dan korporasi kepada masyarakat. Peran ini bersifat politis, kritis, konflikktual dan transformatif. Peran ini biasanya dijalankan melalui advokasi kebijakan, lobi, pernyataan politik, petisi, aksi protes dan aksi unjuk rasa.
- b. *Empowerment* (Pemberdayaan): Peran ini dijalankan melalui kegiatan mengembangkan kapasitas, produktivitas dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, kemudian menumbuhkan kesadaran pada masyarakat dalam membangun keswadayaan, menjaga kemandirian, menggalang keikutsertaan berpartisipasi, dan memperkuat hak-hak warga negara. Peran ini biasanya dijalankan melalui pendidikan, pelatihan, pengorganisasian, pengerahan dan metode alternatif sesuai kepentingan Masyarakat.
- c. *Intermediary Institution* (Lembaga Perantara): sebagai lembaga perantara LSM menghubungkan masyarakat dengan pemerintah atau negara maupun dengan aktor non-negara seperti dunia usaha. Peran ini bisa diambil dengan cara menghubungkan masyarakat dengan LSM, LSM dengan LSM, atau membangun jaringan kerja sama.

Dalam gerakan lingkungan, NGO generasi ketiga berperan sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mereka berfungsi sebagai *watchdog*, advokat, hingga fasilitator partisipasi publik.

2.2.3 Tipologi LSM/NGO

Tipologi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO (*Non-Governmental Organization*) biasanya diklasifikasikan berdasarkan tujuan, bentuk kegiatan, dan pendekatan kerjanya. Berikut beberapa tipologi LSM yang umum digunakan:

1. Berdasarkan Fokus atau Bidang Kegiatan

a. LSM Lingkungan Hidup

Fokus pada isu-isu ekologi, konservasi alam, pengelolaan sampah, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan (contoh: WALHI dan *Greenspace*).

b. LSM Hak Asasi Manusia

Bergerak dalam advokasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (contoh: KontraS dan YLBHI).

c. LSM Pemberdayaan Masyarakat

Memfokuskan diri pada penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (contoh: LP3ES, Bina Swadaya).

d. LSM Kesehatan

Menangani isu kesehatan masyarakat, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan dasar (contoh: Yayasan KNCV Indonesia).

2. Berdasarkan Peran atau Fungsi

a. LSM Advokasi

Mendorong perubahan kebijakan melalui kampanye, lobi, atau pendampingan hukum. Biasanya bersikap kritis terhadap pemerintah atau korporasi.

b. LSM Pelaksana (*Implementing NGOs*)

Terlibat langsung dalam pelaksanaan program, seperti pendidikan, pelatihan, distribusi bantuan, atau pengelolaan proyek.

c. LSM Pendukung (*Support NGOs*)

Memberikan dukungan teknis, riset, pelatihan, atau data untuk LSM lain atau komunitas.

d. LSM Jaringan (*Networking NGOs*)

Membangun dan mengoordinasikan jejaring antar organisasi untuk memperkuat pengaruh kolektif.

3. Berdasarkan Wilayah Cakupan

a. LSM Lokal

Fokus di tingkat komunitas atau daerah tertentu.

b. LSM Nasional

Bergerak dalam skala nasional dengan jangkauan lintas daerah.

c. LSM Internasional

Memiliki jaringan global dan biasanya berasal dari luar negeri (contoh: *Oxfam, WWF, Save the Children*).

4. Berdasarkan Sumber Dana

a. LSM Mandiri

Mendanai kegiatannya secara independen (iuran anggota, usaha sendiri).

b. LSM *Donor-Driven*

Bergantung pada bantuan dari donor luar (internasional atau pemerintah).

Tipologi yang dikenal luas di Indonesia dikembangkan oleh Philip Eldridge(1993), usulannya mengenai kerangka teoritis untuk memahami dan mendefinisikan LSM berdasarkan kegiatan-kegiatannya. Eldridge membagi gerakan LSM Indonesia mengelompokkan ke dalam dua kategori, yakni:

1. LSM Pembangunan

Organisasi dengan aktifitas yang memfokuskan pada agenda pemberdayaan masyarakat secara mendasar atau konvensional, seperti pertanian, irigasi, peternakan, kesehatan, kesenian, kerajinan dan lain sebagainya.

2. LSM Mobilisasi

Organisasi dengan aktifitas yang memfokuskan agendanya pada mobilisasi masyarakat misalnya seputar hak asasi manusia, perempuan, hak masyarakat, pengetahuan hukum, sampai isu lingkungan. WALHI dan mitra bentala merupakan LSM yang termasuk dalam tipologi LSM mobilisasi. Terkait pada isu RTH, WALHI dan Mitra Bentala lebih menekankan pada kesadaran akan isu lingkungan dan hak masyarakat akan lingkungan yang baik dan lestari.

2.3 Konseptualisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.3.1 Definisi Ruang Terbuka Hijau

Definisi RTH sendiri dalam pasal 1 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau adalah suatu ruang terbuka yang kawasannya didominasi oleh vegetasi baik itu pepohonan, semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya. Kawasan ini didirikan berdasarkan kebutuhan dan peruntukkan dalam wilayah tersebut. Tidak hanya untuk menjaga dan menyeimbangkan kondisi lingkungan atau ekosistem sekitarnya, tetapi juga menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas sosial yang memadukan dengan estetika alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau adalah ruang memanjang/ jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada pasal 29 disebutkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dimana proporsi ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota.

RTH adalah bagian dari struktur kota yang memiliki fungsi ekologi, sosial, dan estetika. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH dibagi menjadi:

1. RTH Publik: seperti taman kota, jalur hijau, dan hutan kota.
2. RTH Privat: seperti kebun dan halaman rumah.

2.3.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Dalam perencanaannya suatu ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan kawasan tersebut, diantaranya:

1. RTH Memiliki Fungsi Ekologi. RTH merupakan paru-paru kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO₂), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan.
2. RTH Menjadi Ruang Tempat Warga Dapat Bersilaturahmi dan Berekreasi. Anak-anak mendapatkan ruang untuk bermain, belajar sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau bermain game. Masyarakat dapat berjalan kaki, berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya.
3. RTH Memiliki Fungsi Estetis. Kehadiran RTH memperindah pemukiman, komplek perumahan, perkantoran, sekolah, mall, dan lain-lain. Bayangkan suasana kantor yang kering, sekolah yang panas, perumahan yang gersang, mall yang hanya dipenuhi tembok dan tanaman artifisial. Bandingkan dengan kantor, sekolah, perumahan, dan mall yang menghijau. Bukan saja hati dan perasaan jadi adem. Kepala pun bisa diajak berpikir lebih jernih dan kreatif.
4. RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi. RTH dapat menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang lainnya yang berbeda peruntukannya.
5. RTH memenuhi fungsi pendidikan. RTH menjadi ruang tempat satwa dan tanaman yang bisa dijadikan sarana belajar. Kalau anak-anak juga dilibatkan dalam pengelolaan RTH, mereka juga akan mendapat pelajaran *soft skill* yang penting dan mungkin tak bisa didapatkan di bangku sekolah: belajar berorganisasi dan menghayati nilai-nilai luhur dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.
6. RTH juga punya fungsi ekonomis. Jenis-jenis tanaman tertentu punya nilai jual dan nilai konsumsi yang lumayan. Bunga, buah-buahan, kayu-

kayuan. Apabila ditata dengan baik, RTH bukan saja menjadi lokasi wisata yang strategis, namun juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Oleh karena itu, keberadaan RTH dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

2.3.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki berbagai manfaat serta dampak yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Manfaat Langsung Dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapat hasil alam atau bahan-bahan untuk dijual atau diolah kembali sesuai dengan kegunaannya.
2. Manfaat Tidak Langsung Berjangka panjang dan bersifat *intangible*, yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

2.3.4 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek utama, yakni karakter fisik, fungsi, struktur ruang, dan kepemilikan. Dari segi karakter fisik, RTH terbagi menjadi dua jenis, yaitu RTH alami yang mencakup kawasan habitat liar, area konservasi seperti hutan lindung, serta taman nasional; dan RTH non-alami atau hasil rancangan manusia, seperti taman kota, lapangan olahraga, jalur hijau di sepanjang jalan, hingga area pemakaman. Berdasarkan fungsi, RTH memainkan peran penting dalam mendukung keseimbangan ekologis, memperkuat interaksi sosial dan budaya, memperindah lingkungan secara visual (estetika), serta memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi. Ditinjau dari struktur ruangnya, RTH dapat dibentuk mengikuti pola ekologis seperti mengelompok, memanjang, atau tersebar, serta mengikuti struktur planologis yang disesuaikan dengan hierarki dan tata ruang

perkotaan. Sementara itu, berdasarkan aspek kepemilikan, RTH dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu RTH publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah, serta RTH privat yang berada di bawah kepemilikan dan pengelolaan individu, kelompok, atau badan hukum tertentu.

Dalam konteks perkotaan seperti Bandar Lampung, RTH seringkali terancam oleh ekspansi pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, peran NGO dalam mengadvokasi dan menjaga keberadaan RTH menjadi krusial.

2.3.5 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Penyediaan RTH terhadap perkotaan dapat didasari pada hal-hal berikut:

A. Berdasarkan Luas Wilayah.

Penyediaan RTH di tiap wilayah pada suatu perkotaan sebagai berikut:

1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat.
2. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.
3. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
4. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika sebuah kota.

B. Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

1. 250 jiwa: Taman RT, di tengah lingkungan RT.
2. 2500 jiwa: Taman RW, di pusat kegiatan RW. Bonbin Zoo Redesain Kebun Binatang Surabaya 7
3. 30.000 jiwa: Taman Kelurahan, dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan.
4. 120.000 jiwa: Taman kecamatan, dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan.
5. 480.000 jiwa: Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar).

Sumber: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012

C. Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

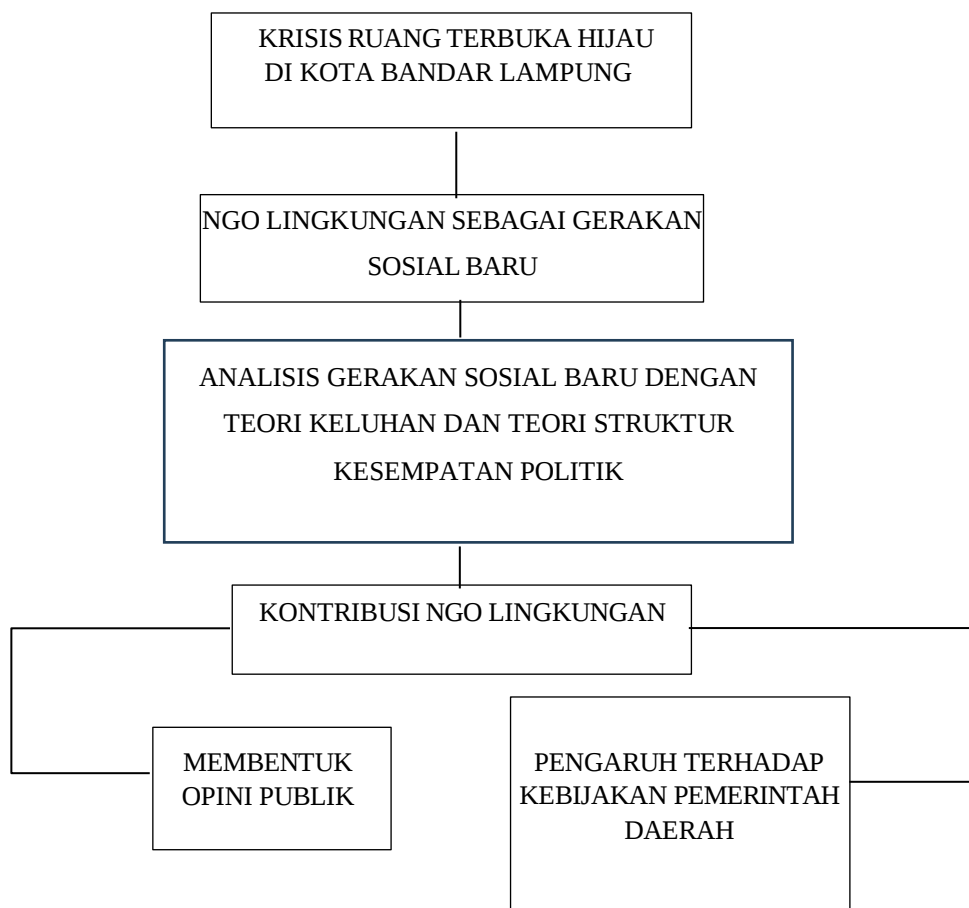
2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa meningkatnya degradasi lingkungan di perkotaan, khususnya terkait berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), telah memicu lahirnya bentuk-bentuk gerakan sosial baru yang tidak sepenuhnya terikat pada struktur politik formal. Dalam konteks ini, organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan hadir sebagai aktor penting yang mendorong agenda-agenda advokasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat untuk

mempertahankan dan memperluas RTH. Kerangka pikir penelitian ini bertumpu pada konsep Gerakan Sosial Politik Baru (*New Social Movement*) yang lebih menekankan pada isu-isu non-material (seperti lingkungan, identitas, dan partisipasi), serta pendekatan *Environmental Non-Governmental Organization* (NGO) sebagai aktor sipil yang mampu menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik, khususnya terkait isu lingkungan dan tata ruang kota.

Dalam konteks Kota Bandar Lampung, NGO lingkungan seperti Walhi dan LK21 memiliki peran strategis dalam menyuarakan isu RTH. Peran ini tidak hanya dilihat dari segi aksi langsung di lapangan, tetapi juga keterlibatan mereka dalam membentuk opini publik dan mendorong pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Berikut ini kerangka berpikir penelitian:



Gambar 1. Kerangka Pikir.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diteliti. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Pada hakikatnya penelitian merupakan cara untuk menentukan kebenaran atau membenarkan kebenaran. Sehingga untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis perlu menggunakan metode penelitian deskriptif yang merupakan istilah umum, dan mencakup beberapa teknik deskriptif di antaranya, penelitian yang menuturkan, mengkalsifikasikan dan menganalisis data serta untuk menemukan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang dengan menggunakan teknik *interview*, dokumentasi dan studi pustaka. yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran serta kontribusi NGO lingkungan dalam isu ruang terbuka hijau, serta bagaimana gerakan ini membentuk pola gerakan sosial politik baru di tingkat lokal. Pendekatan ini dipilih agar dapat menggali makna, strategi, serta dinamika sosial-politik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memperjelas batasan objek kajian sehingga peneliti tidak terjebak pada melimpahnya data di lapangan serta dapat menyaring informasi yang tidak berkaitan langsung dengan masalah dan tujuan penelitian. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus bersifat menyeluruh atau holistik, artinya peneliti melihat situasi sosial secara utuh yang

mencakup aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain.

Penetapan fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu teori gerakan sosial baru menurut Singh (2010):

1. Keluhan: pada aspek ini peneliti akan mengkaji bagaimana dorongan, motivasi dan keluhan yang ada dapat mempengaruhi NGO Lingkungan berkontribusi dalam memperjuangkan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.
2. Struktur Kesempatan Politik: fokus ini menelaah bagaimana peluang NGO Lingkungan untuk menyuarakan aspirasinya di ruang publik dan membentuk opini publik.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Bandar Lampung, yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Provinsi Lampung. Sebagai kota metropolitan yang terus berkembang, Bandar Lampung menghadapi tekanan signifikan terhadap keberlanjutan ruang terbuka hijau (RTH), terutama akibat meningkatnya laju urbanisasi dan masifnya pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menjadikan kota tersebut sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika dan tantangan pengelolaan RTH, serta peran berbagai aktor sosial, termasuk organisasi masyarakat sipil, dalam mempertahankan ruang-ruang hijau di tengah pertumbuhan kota yang pesat.

Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari bulan September hingga bulan November 2025. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti melakukan serangkaian kegiatan lapangan yang meliputi observasi terhadap kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan isu RTH, wawancara mendalam dengan para informan kunci seperti perwakilan NGO dan Masyarakat serta, pengumpulan data melalui dokumentasi berbagai kegiatan, media, maupun arsip pendukung lainnya. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh data yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari NGO lingkungan yang aktif di Kota Bandar Lampung, yaitu Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi), Lembaga Konservasi 21 dan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam isu ruang terbuka hijau (RTH) serta relevansi peran mereka terhadap fokus penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.

Adapun Informan penelitian dalam penelitian ini disajikan dalam tabel, yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

Nama	Instansi	Jabatan
Irfan Tri Musri	WALHI	Direktur Walhi Lampung
Edy Karizal	Lembaga Konservasi 21	Direktur Lembaga Konservasi 21
Masyarakat	Kota Bandar lampung	-

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang didapat secara langsung dari objek penelitian dari kuisioner dan wawancara. Kemudian, data sekunder yakni data yang didapat melalui dokumen-dokumen kepustakaan, seperti literatur, serta dari informasi dan instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat melalui pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang diajukan secara langsung. Data primer penelitian ini didapat

melalui wawancara yang dilakukan bersama para narasumber di Kota Bandar Lampung, mengikuti panduan yang disusun untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penggunaan data primer bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga menghasilkan informasi yang autentik dan kontekstual.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan bisa diakses oleh peneliti melalui mendengar, melihat, dan membaca. Biasanya, data sekunder bersumber dari data primer yang telah dikaji oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, data sekunder yang dipakai mencakup literatur, artikel jurnal, serta situs web yang berkaitan dengan tema penelitian. Data ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan pembandingan terhadap temuan yang didapat dari data primer.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*): Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan data menggunakan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada narasumber, dan jawaban-jawaban narasumber dicatat atau direkam dengan alat perekam. Tujuan wawancara sendiri adalah mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan atau pendapat, sikap atau tanggapan, keterangan dan sebagainya) dari pihak tertentu. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan kepada NGO Lingkungan yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu, Walhi dan Lembaga Konservasi 21 karena Walhi dan Lembaga Konservasi 21 dikenal aktif sebagai NGO Lingkungan yang menyuarakan kepentingan lingkungan di Kota Bandar Lampung dan untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan informasi pada penelitian ini akan dilakukan juga wawancara kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung.
2. Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi berkaitan dengan penelitian. Data yang didapatkan dari teknik ini dapat berupa cuplikan, kutipan atau penggalan-penggalan dari catatan organisasi di

media, klinis atau program, memorandum-memorandum dan korespondensi, terbitan dan laporan resmi. Maka, terkait dokumentasi pada penelitian ini akan diperoleh dari berbagai sumber seperti media *online*, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya, guna keperluan data terkait subjek yang diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penginformasian data kepada orang lain yang dicari dan diperoleh dari berbagai Teknik pengumpulan data lalu disusun secara sistematis agar mudah di pahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merangkum, memfokuskan pada data penting, memilih yang pokok, mencari tema dan alurnya. Dalam penelitian ini reduksi data akan difokuskan pada data yang berkaitan dengan kontribusi dan hambatan NGO Lingkungan Kota Bandar Lampung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan men-*display* data, akan mempermudah memahami yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data dengan deskriptif, naratif dan bagan-bagan jika diperlukan untuk menjelaskan data yang didapat.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian yang telah didapatkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, namun kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti yang valid maka ketika kembali ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan diawal adalah kesimpulan yang kredibel.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan terhadap data yang sudah ada. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa validitas adalah tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Validitas ini menjadi aspek penting dalam penelitian karena memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi atau kejadian yang sebenarnya berlangsung di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai metode untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi data dari berbagai sumber untuk menentukan keandalan informasi yang dikumpulkan. Teknik ini membantu mengurangi bias subjektif dan meningkatkan akurasi data. Dengan demikian, pendekatan triangulasi tidak hanya meningkatkan keabsahan data tetapi juga mendukung kualitas dan kredibilitas penelitian secara keseluruhan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam Gerakan Sosial, NGO lingkungan di Kota Bandar Lampung seperti Walhi dan Lembaga Konservasi 21 termasuk dalam pelaku gerakan sosial baru karena gerakan yang dilakukan untuk memperjuangkan isu lingkungan salah satunya isu ruang terbuka hijau yang merupakan dalam isu-isu kontemporer dalam ranah gerakan sosial. Masalah- masalah yang terjadi seperti banjir dan alih fungsi lahan merupakan titik awal untuk memperjuangkan pelestarian ruang terbuka hijau.

Munculnya sebuah gerakan yang lahir dari keluhan-keluhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur kesempatan politik di suatu negara. Jika struktur politik bersifat tertutup, organisasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan agenda gerakannya. Sebaliknya, ketika struktur politik bersifat terbuka seperti yang terjadi di Indonesia setelah era orde baru organisasi memiliki ruang lebih luas untuk beraksi. Hal ini memungkinkan Walhi dan Lembaga Konservasi 21 sebagai NGO lingkungan, untuk lebih leluasa memainkan perannya dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan, termasuk pelestarian ruang terbuka hijau.

Kontribusi NGO lingkungan di Kota Bandar Lampung pada isu ruang terbuka hijau dapat dilihat dari peran NGO yang di paparkan oleh Abdi Rahmat yang dimana suatu NGO memiliki peran-peran yang bisa dilakukan di antaranya sebagai *countervailing power* (kekuatan penyeimbang), *empowerment* (pemberdayaan) dan *intermediary institution* (lembaga perantara).

Peran yang dijalankan Walhi dan Lembaga Konservasi 21 sebagai *countervailing power* atau kekuatan penyeimbang tercermin melalui beberapa strategi. Salah satunya adalah melakukan gugatan terhadap pemerintah terkait kebijakan yang

berdampak pada pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota Bandar Lampung. Selain itu, Walhi dan Lembaga Konservasi 21 juga mengadakan aksi protes, seperti orasi dan penyampaian pendapat di depan publik pada momen tertentu, untuk mengkritisi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah. Tidak kalah penting, Walhi dan Lembaga Konservasi 21 juga mengeluarkan *statement* (pernyataan) melalui media cetak maupun online, dengan tujuan mendorong peningkatan jumlah dan luasan ruang terbuka hijau serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Bandar Lampung.

Dalam peran *empowerment* (pemberdayaan) Walhi dan Lembaga Konservasi 21 melakukan berbagai upaya kepada masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan. Hal ini mencakup edukasi mengenai dampak degradasi lingkungan serta pentingnya pelestarian ruang terbuka hijau dan sumber daya alam di sekitar mereka. Selain itu, upaya tersebut juga ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran akan hak-hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan lingkungan, serta meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat agar mampu bergerak secara mandiri dalam menjaga dan memperjuangkan lingkungan hidup. Pemberdayaan yang dilakukan seperti, *Green student movement*, Pelatihan paralegal, dan Program sekolah lingkungan hidup yang dilakukan oleh Walhi.

Peran NGO sebagai *intermediary institution* (lembaga perantara) dilakukan melalui membangun jaringan dan kerjasama antar organisasi untuk memperkuat agenda advokasi dan aksi lingkungan. NGO seperti Walhi maupun Lembaga Konservasi 21 membentuk kolaborasi dengan NGO lingkungan lainnya serta komunitas lokal, seperti Mitra Bentala, Watala, MAHUSA Unila, dan jaringan JKEL, untuk melaksanakan kegiatan seperti penanaman mangrove, kampanye pelestarian ruang terbuka hijau, dan pembersihan sampah di wilayah pesisir.

Meskipun kolaborasi ini bersifat strategis dan efektif dalam memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat advokasi lingkungan, kerja sama yang dilakukan umumnya terbatas pada NGO atau komunitas lokal, tanpa adanya dukungan resmi dari pemerintah daerah atau legislatif. Dengan demikian,

jaringan antar NGO berperan penting sebagai fasilitator dan penghubung masyarakat dalam mencapai tujuan lingkungan, namun interaksi langsung dengan pemerintah masih terbatas pada hubungan individu, bukan kerjasama formal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa NGO lingkungan di Kota Bandar Lampung, khususnya Walhi dan Lembaga Konservasi 21, memiliki kontribusi signifikan sebagai bagian dari gerakan sosial baru dalam memperjuangkan isu ruang terbuka hijau. Kontribusi tersebut muncul sebagai respons atas keluhan ekologis yang ditandai dengan menyusutnya ruang terbuka hijau meningkatnya risiko banjir, serta menurunnya kualitas lingkungan dan ruang sosial masyarakat.

Walhi dan Lembaga Konservasi 21 menunjukkan karakteristik gerakan sosial baru melalui orientasi gerakan yang bersifat tematik, berfokus pada isu lingkungan, serta tidak berlandaskan pada kepentingan ekonomi atau ideologi politik tertentu. Pola organisasi yang relatif cair, partisipatif, dan berbasis jaringan memperkuat posisi NGO sebagai aktor masyarakat sipil yang adaptif dalam menghadapi dinamika kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

Dalam praktiknya, kontribusi NGO lingkungan diwujudkan melalui tiga bentuk utama. Pertama, pembentukan opini publik dengan membangun wacana kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait alih fungsi lahan dan minimnya RTH, baik melalui pernyataan sikap, advokasi kebijakan, maupun kampanye publik. Kedua, mobilisasi gerakan yang dilakukan melalui aksi protes, kegiatan edukasi lingkungan, serta pelibatan komunitas dan masyarakat dalam isu-isu ruang terbuka hijau. Ketiga, pengembangan isu RTH melalui media digital yang dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi, konsolidasi jaringan, dan perluasan dukungan publik secara lebih luas dan cepat.

Melalui strategi tersebut, Walhi dan Lembaga Konservasi 21 tidak hanya berperan sebagai penekan kebijakan (*countervailing power*), tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong tumbuhnya kesadaran ekologis dan

partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan NGO lingkungan di Kota Bandar Lampung memperlihatkan bahwa gerakan sosial baru memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi partisipatoris serta mendorong tata kelola ruang terbuka hijau yang lebih adil dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, khususnya kepada Walhi dan Lembaga Konservasi 21 sebagai salah satu NGO yang aktif dan kritis dalam mengawal isu lingkungan hidup. Dalam konteks perjuangan terkait ruang terbuka hijau di Bandar Lampung, saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong Kerja Sama Formal dengan Pemerintah

NGO lingkungan seperti Walhi dan Lembaga Konservasi 21 perlu membangun kerja sama yang lebih terstruktur dengan pemerintah daerah, melalui MoU atau forum dialog rutin, agar upaya memperjuangkan dan memperluas RTH dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Memperluas Jaringan antar NGO dan Komunitas

Kolaborasi yang sudah terbentuk antar NGO lokal perlu diperluas dengan jaringan NGO nasional maupun internasional agar kapasitas advokasi, sumber daya, dan strategi gerakan sosial semakin kuat.

3. Memperkuat Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan seperti Green Student Movement, pelatihan paralegal, dan Sekolah Lingkungan Hidup perlu diperluas cakupannya agar semakin banyak masyarakat perkotaan yang sadar hak lingkungan dan mampu terlibat aktif dalam menjaga RTH.

DAFTAR PUSTAKA

- Brockett, C. D. 2005. *Political Movements and Violence in Central America*. Cambridge University Press.
- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekontruksi Civil Society: Wacana dan Aksi ORNOP di Indoensia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Della, P., Donatella, & Diani, M. 2006. *Social Movements: An Introduction (Second Edition)*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Dina, N. 2021. Manifestasi Gerakan Sosial Baru dalam Krisis Iklim (Studi Kasus: Extinction Rebellion Indonesia). *Jurnal PolGov*, Vol 4. No. 1
- Eldridge, J.E.T.1993. *Indonesian NGOs in Local and National Development*. Indonesia: Asian Studies Association of Australia.
- Foweraker, J. 1995. *Theorizing Social Movements*. London: Pluto Press.
- Johnson, C. 1966. *Revolutionary Change*. Boston: Little, Brown and Company.
- Heyzer, N. 1995. *Government–NGO Relations in Asia*. Kuala Lumpur: APDC
- Korten, D. C. 1990. *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*. West Hartford, Connecticut: Kumarian Press.
- Kriesi, H. 2004. “*Political Context and Opportunity.*”, *The Blackwell Companion to Social Movements* (pp. 67-90). Oxford: Blackwell
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. 2001. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.
- Melucci, A. 1989. *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*. Philadelphia: Temple University Press.
- Nofrima, S. & Qodir, Z. 2021. Gerakan Sosial Baru Indonesia: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 185-210.
- Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah No. 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2012 Tahun 2021 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 05/PRT/m/ 2008

Pramaiswara, P., Wibisono, D., & Syah, P. 2022. Gerakan Sosial Baru (Studi Tentang Kontribusi Benua Lestari Indonesia Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Kota Tangerang). *Jurnal Sociologie*, 1(2), 196-217.

Rahayu, S. N., & Prihatin, S. D. 2023. Gerakan Sosial Baru: Pengolahan Sisa Bahan Organik oleh Komunitas Eco-enzyme Nusantara di Kabupaten Sleman. *Journal of Social Development Studies*, 4(2), 115 - 128.

Renaldy, M., & Sofri, G. 2024. Analisis Ruang Terbuka Hijau pada Kompleks Perumahan di Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung. *Skripsi Diploma*, UIN Raden Intan Lampung.

Rilansari, V., & Ulhaq, W. D. 2024. Perspektif Fiqih Al-Bi'ah dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 19(1).

Sinatra, F., Azhari, D., Musadri, A., & Affandi, M. I. 2022. Prinsip Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Planologi*, 19(1).

Singh, R. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Penerjemah Eko P. Darmawan. Yogyakarta: Resist Book, 2010.

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sukaman. Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

Tarrow, S. 2011. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (Third Edition)*. New York: Cambridge University Press.

Virian, D. 2023. Gerakan Sosial Baru Dan Ekologi Politik: Peran Walhi Dalam Mengawasi Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Di Dki Jakarta Tahun 2017-2021. *Bachelor thesis*, Universitas Nasional.

Wahyudin, E. A. 2018. Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan: Studi atas Kontribusi WALHI terhadap RTH di DKI Jakarta (2004–2017). *Disertasi UIN Syarif Hidayatullah*. Menganalisis peran WALHI sebagai contoh Gerakan Sosial Baru dalam advokasi RTH.

Wakhidah, A. Z., Anggraini, E., Hanifah, M., Nurlillah, R., & Mulyani, S. 2024. Urban Green Open Space in Metro, Lampung: Vegetation Structure, History, and Function. *Media Konservasi*, 29(2), 272.

Wallace, A. 1876. *The Geographical Distribution of Animals*. New York: Harper & Brothers.